

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BINAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS



Oleh

BENNIS MANIK
NPM. 071801078

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2009**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BINAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

BENNIS MANIK
NPM. 071801078

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Binaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara

N a m a : Bennis Manik

N P M : 071801078

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Erika Revida, M.Si **Drs. Miftahuddin, MBA**

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur

Drs. Kariono, MA

Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada Tanggal 16 April 2009

N a m a : Bennis Manik

N P M : 071801078



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Kariono, MA

Sekretaris : Warjio, SS, MA

Pembimbing I : Prof. Dr. Erika Revida, M.Si.

Pembimbing II : Drs. Miftahuddin, MBA

Penguji Tamu : Drs. Heri Kusmanto, MA

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara

Nama : Bennis Manik
N i m : 071.801 078
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof.DR.Erika Revida,Dra,MS
Pembimbing II : Drs.Miftahuddin MBA

1. Pendahuluan

Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu pelaku ekonomi dan merupakan wujud kehidupan ekonomi sebahagian besar rakyat Indonesia dan juga merupakan jalur utama sistim ekonomi kerakyatan.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Sumatera Utara secara Kwantitas cukup memadai hal ini terlihat meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah namun secara kualitas masih jauh dari yang diharapkan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian Kwantitatip Diskrifiif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alami (natural) dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci Hasil penelitian kwalitatif lebih menekankan makna daripada Generalisasi. Penelitian kwalitatif lebih menekankan pada pemahaman hubungan yang kompleks diantara semua yang ada dan mencoba membangun pemahaman yang tegas untuk membaca melalui deskripsi

3. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5 (lima) unsur yang mempengaruhi implementasi Kebijakan dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kebijakan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,rendahnya pengetahuan Pengurus Koperasi dan pelaku Usaha Kecil Menengah sehingga tidak mampu bersaing dengan pelaku Usaha lainnya yang sejenis dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah kurang dimengerti oleh pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga usaha yang dilakukan masih monoton tanpa ada pengembangan usaha.

Penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara serati angket pertanyaan yang disebarluaskan kepada pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara bahwa implementasi kebijakan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera belum berjalan efektif .

4. Kata Kunci.

Pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mengentaskan kemiskinan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis sampai dengan saat ini diberikan kesehatan dan kekuatan serta anugerah dalam penyusunan Tesis ini sampai dengan selesai. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Magister Administrasi Publik. Adapun judul Tesis yang penulis angkat dalam penulisan Tesis ini adalah : “ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BINAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA** “ Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area Medan.

Tesis ini berisikan pembahasan tentang implementasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dimana Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku Ekonomi yang merupakan ekonomi kerakyatan yang secara kuantitas menunjukkan perkembangan yang baik namun secara kualitas keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum sepenuhnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini terlihat bahwa usaha yang dikelola oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih sebatas untuk lepas makan saja sehingga pemerintah mengupayakan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui berbagai kebijakan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi kita yang mau peduli akan nasib

Pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Kecil di Indonesia umumnya dan Sumatera Utara khususnya.

Medan April 2009
Penulis

Bennis Manik
NPM.071 801 078



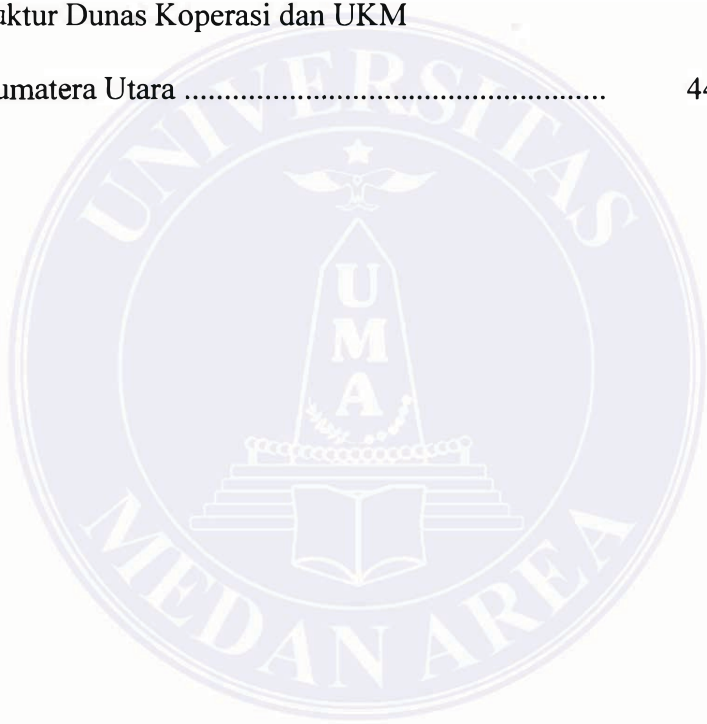
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Perumusan masalah	4
1.3. Tujuan penelitian	4
1.4. Manfaat hasil penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Sejarah Koperasi Indonesia	11
2.1. Kebijakan publik	12
2.2. Implementasi kebijakan	14
2.3. Kebijakan pengembangan KUKM	22
2.4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara	27
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Bentuk penelitian	36
UNIVERSITAS MEDAN AREA	
3.2. Lokasi penelitian	36

3.3. Unit analisis dari informan peneliti	37
3.4. Teknik pengumpulan data	37
3.5. Konsep penelitian	38
3.6. Teknik analisa data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS KOPEASI DAN UKM	
PROVINSI SUMATERA UTARA	41
4.1. Profil Dinas Koperasi dan UKM Prop.S.Utara	41
4.1.1. Historis Dinas Koperasi dan UKM	42
4.1.2. Sumber daya manusia	42
4.1.3. Kelembagaan	43
4.1.4. Visi dan Misi	45
4.1.5. Pembinaan Koperasi dan UKM	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
5.1. Hasil penelitian	49
5.2. Variabel penelitian	50
5.3. Analisa data	55
5.3.1. Implementasi kebijakan	55
5.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi.....	57
5.3.3. Upaya yang dilakukan	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	61
6.1. Kesimpulan	61
6.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Sistem kebijakan publik	13
Gambar 2 Model implementasi kebijakan	15
Gambar 3 Model implementasi kebijakan Donal Van Meter dan Carl Van Horn	16
Gambar 4 Bagan struktur Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	44



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 5.1 Distribusi responden menurut jenis kelamin	48
Tabel 5.2 Distribusi responden menurut umur	49
Tabel 5.3 Distribusi responden menurut pendidikan	49
Tabel 5.4 Pendapat responden tentang struktur organisasi	50
Tabel 5.5 Pendapat responden tentang kualitas SDM pengelola Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	50
Tabel 5.6 Pendapat responden tentang peralatan dalam kebijakan Pengembangan Koperasi dan UKM	51
Tabel 5.7 Pendapat responden tentang peraturan dalam pelaksanaan Kebijakan pengembangan KUKM	51
Tabel 5.8 Pendapat responden tentang petunjuk teknis peraturan Dalam kebijakan pengembangan KUKM	52
Tabel 5.9 Pendapat responden tentang petunjuk pelaksanaan Dalam kebijakan pengembangan KUKM	52
Tabel 5:10 Pendapat responden tentang prosedur kerja dalam kebijakan pengembangan KUKM	53
Tabel 5.11 Pendapat responden tentang program kerja dalam kebijakan pengembangan KUKM	53
Tabel 5.12 Pendapat responden tentang jadwal kerja dalam Kebijakan pengembangan KUKM	54
Tabel 5.13 Rata-rata skor implementasi kebijakan pengembangan Koperasi dan UKM	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar belakang.

Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat dipandang sebagai suatu perubahan dalam sistim Administrasi Negara Republik Indonesia dan lahirnya Undang-undang ini menegaskan kembali sikap Pemerintah Pusat setelah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 untuk menyerahkan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sesuai Undang-undang ini pada prinsipnya semua kewenangan bidang pemerintahan adalah milik Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan, serta mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang mengemuka akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Amanah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut.

Mengingat sangat luasnya kewenangan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, maka potensi munculnya konflik dan hambatan dalam menjalankan kewenangan tersebut selalu timbul. Benturan kepentingan antara Pemerintah Daerah di satu sisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan masyarakat disisi lain yang menuntut kualitas pelayanan yang lebih baik akan lebih mungkin terjadi, oleh karena itu sejauh mana Pemerintah Daerah mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang mengemuka akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah

dalam menjalankan amanah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, dalam hal ini salah satu faktor kunci adalah melalui penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.

Sementara ini masyarakat sedang menghadapi banyak perubahan dalam tingkat kecepatan yang sebelumnya tidak pernah sekalipun terpikirkan. Perubahan yang bergejolak (*turbulem*) dan kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) yang terus berjalan dengan cepat dan tidak menentu dewasa ini telah mendorong birokrasi pemerintah untuk berpacu mengembangkan strategi perubahan dan kebijakan antisipatif, hal ini dimaksudkan agar pemerintah mampu menyesuaikan diri dengan berbagai ragam tuntutan baru dalam lingkungan strategis masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam suatu organisasi, Pemerintah Daerah, perubahan yang terjadi sangatlah kompleks begitu juga dengan Satuan kerja Perangkat Daerah lainnya khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menyangkut berbagai aspek seperti pertimbangan terhadap nilai-nilai yang biasa mengungkung Birokrasi Pemerintahan. Saat ini dan dimasa depan semua organisasi Pemerintah Daerah menghadapi perubahan dalam siklus kehidupan organisasinya dari waktu ke waktu karena itu untuk menjadi organisasi masa depan, maka Pemerintah Daerah harus pula dapat menyelesaikan masalah sehari hari seperti apabila Pemerintah Daerah akan merencanakan Strategi Pengembangan melalui suatu Kebijakan dalam rangka Pemberdayaan khususnya Ekonomi Kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N : 2003, Analisis Kebijakan Public, Jokjakarta : PT Hanindita Graha Widya
- Edward III . 1980. Implementation Public Policy Washinton DC : Congressional Quarter Perss
- Mazmania Daniel H,dan Paul A.Sabatian 1983 , Implementasi and Public Policy ,New York : Haeper Collin
- Indarwanto;2001,Teori Administrasi Publik dan Birokrasi, Malang Taroda
- Islami,M,Irfan;2000, Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara, Jakarta : Sinar Grafika
- Jones, Charles O ; 1996, Pengantar Kebijakan Publik,Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Nugroho D, Riant : Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta : PT.Eka Media Kompuntindo
- Muslim Nasutian tahun 1999 dalam buku Koperasi menjawab kondisi ekonomi Nasional, Lembaga pemberdayaan Ekonomi Rakyat
- Sugiono; 2005 Metode Penelitian Administrasi, Bandung :Alfabet.
- Sutiyono; 2004, Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi, Semarang: Fisip Undip.
- Tangkilisan,Hessel Nogi S ; 2003, Implementasi Kebijakan Publik, Jokjakarta : Lukman Offset
- Tangkilisan,Hessel Nogi S ; 2003, Evaluasi Kebijakan Publik, Jokjakarta : Balairung & Co .
- Thomas, Colin Coulson ; 1996, Public Relatian : Pedoman praktek untuk PR, Jakarta:Bumi Aksara.
- Utomo,Warsito,2003,Dinamika Administrasi Public : Analisis empiris seputar isu-isu Kontemporer dalam Administrasi publik, Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Jokjakarta: Media Pressindo.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara , Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 7 tahun 2004 tentang Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2002),Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor : 061.296.K/tahun 2002 tentang Tugas, fungsi dan Tatakerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah provinsi Sumatera Utara.

Republik Indonesia, 1992 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Republik Indonesia,1995, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Republik Indonesia,1994,Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1994 tentangPersyaratan dan Tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Republik Indonesia, 1995, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Republik Indonesia,1998, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (2002),Pedoman penyajian Laporan keuangan Koperasi.

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Jakarta (2002),Petunjuk teknis perkuatan permodalan UKMK dan lembaga Keuangan dengan penyediaan Modal awal dan padanan melalui KSP/USP Koperasi.

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun (2005) , tentang Pedoman Peraturan Perkoperasian di bidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi.

Ibnoe Soejono,terjemahan pengantar ,Jati diri Koperasi .ICA Co-Operative Identity Statement Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad ke – 21 (LSP21)

Zulkarnain Lubis,Koperasi untuk Ekonomi Rakyat.Cita pustaka Media perintis.

Noer Soetrisno Dr. Intrans (2001) ,Rekonstruksi Pemahaman Koperasi merajut kekuatan Ekonomi Rakyat Pengantar Dr.Boediono